



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.3.2/Kep.193-HUK/III/2025

Kep TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.3.2/KEP.77-HUK/I/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025 dan dengan adanya usulan tambahan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah dari Perangkat Daerah, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 100.3.2/Kep.77-Huk/I/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 100.3.2/Kep.77-Huk/I/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Hukum	

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 100.3/BA.126/SETDA.Huk tanggal 20 Maret 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 100.3.2/Kep.77-Huk/I/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025. ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 100.3.2/Kep.77-Huk/I/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025.

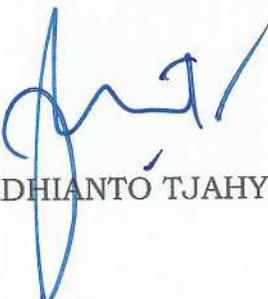
KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yakni mengubah Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Maret 2025

WALI KOTA BEKASI,

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	A.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	H
Kepala Bagian Hukum	L


TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth. :

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 100.3.2/Kep.193-HUK/III/2025
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 WALI KOTA BEKASI NOMOR
 100.3.2/KEP.77-HUK/I/2025 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
 DAERAH TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL
1	Badan Pendapatan Daerah	1) Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan Pengurangan Pokok Ketetapan Serta Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan; 2) Tata Cara Pemberian, Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3) Tata Cara Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah; 4) Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 5) Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6) Penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Secara elektronik; 7) Pengelolaan Pajak Daerah secara <i>Online</i> ; 8) Pengawasan terhadap Kegiatan Transaksi Usaha Wajib Pajak; 9) Road Map Pengembangan Digitalisasi Sistem Pajak Daerah; 10) Pelaksanaan Opsen; 11) Kode Etik; 12) Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah.
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1) Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2) Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan; 3) Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Hukum	

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL
4	Satuan Polisi Pamong Praja	Tata cara Penanganan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Petunjuk Pelaksanaan BOKD; 2) Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi; 3) Pencegahan Percepatan Penanganan dan Penurunan Stunting Kota Bekasi; 4) Pemberian Uang Operasional Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Kader Institusi Masyarakat Pedesaan Tingkat Kelurahan se-Kota Bekasi Tahun 2025; 5) Tenaga Administrasi Pengolahan Data Tingkat Kota/Kecamatan/kelurahan se-Kota Bekasi Tahun 2025; 6) Ketahanan Keluarga; 7) Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia; 8) Kampung KB.
6	Badan Perencanaan, Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2026; 2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2025; 3) Strategi Sanitasi Kota, Kota Bekasi; 4) Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit di Kota Bekasi; 5) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026; 6) Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029; 7) Perubahan Rencana Srategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026; 8) Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.
7	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2) Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 3) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Hukum	

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL
		4) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 5) Analisis Standar Belanja Fisik; 6) Kebijakan Akuntansi; 7) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi; 8) Kebijakan Pendukung Laporan Keuangan; 9) Standar Satuan Harga Tahun 2026; 10) Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Diatas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kota Bekasi; 11) Tata cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Bekasi; 12) Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 13) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
8	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1) Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Bekasi; 2) Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Bekasi; 3) Penyelenggaraan Izin Reklame.
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1) Tata Cara Pelayanan Penanganan Anak dari Tindakan Kekerasan Perdagangan dan Eksploitasi; 2) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; 3) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi; 4) Perlindungan yang Wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Perempuan.
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
11	Dinas Kesehatan	1) Depot Air Minum; 2) Penanggulangan Penyakit Menular;

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	↓
Kabag Hukum	t

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL
		<ul style="list-style-type: none"> 3) Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 4) Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan; 5) Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 6) Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kota Bekasi; 7) Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak Lain RSUD Kota Bekasi; 8) Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Teluk Pucung Daerah Kota Bekasi; 9) Retribusi Layanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Bekasi; 10) Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kota Bekasi Tahun 2024-2028; 11) Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah ada Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 12) Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2024-2026 pada Lingkup Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 13) Pelaksanaan Anggaran dan Penatausahaan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
12	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Air; 2) Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran atau Perusakan Lingkungan Hidup; 3) Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4) Pengurangan Sampah; 5) Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan; 6) Pencabutan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemilihan Mitra Kerja Sama Pengolahan Sampah Untuk Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Hukum	

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL
13	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1) Perubahan Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 57.B Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama; 2) Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Kota Bekasi; 3) Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan; 4) Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
14	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1) Manajemen <i>Corporate University</i> (Manajemen Strategi Pengembangan SDM); 2) Manajemen Pengetahuan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik); 3) Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik); 4) <i>Coaching</i> , Monitoring dan Konseling Aparatur Pemerintah Kota Bekasi; 5) Pedoman Penyelenggaraan Magang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
15	Bagian Organisasi	1) Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; 2) Nomenklatur dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; 3) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bekasi; 4) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi; 5) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 6) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi; 7) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi; 8) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya air Kota Bekasi;

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Hukum	

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL
		<p>9) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi;</p> <p>10) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;</p> <p>11) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;</p> <p>12) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;</p> <p>13) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;</p> <p>14) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;</p> <p>15) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi;</p> <p>16) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;</p> <p>17) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;</p> <p>18) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;</p> <p>19) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi;</p> <p>20) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;</p> <p>21) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;</p> <p>22) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;</p> <p>23) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;</p>

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Hukum	

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL
		24) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi; 25) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kota Bekasi; 26) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi; 27) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi; 28) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi; 29) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi; 30) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi; 31) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi; 32) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi; 33) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi; 34) Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
16	Bagian Administrasi Pembangunan	1) Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025; 2) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kota Bekasi; 3) Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026;

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Hukum	

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL
		4) Perjalanan Dinas Jabatan.
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Pedoman Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
18	Bagian Tata Pemerintahan	Pedoman Program Penataan Lingkungan Rukun Warga Keren.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

WALI KOTA BEKASI,


 TRI ADHIANTO TJAHYONO